

Ringkasan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham RI

1 April 2020

Agenda: Lapas dan Imigrasi Sehubungan dengan Covid 19

Pengantar

- Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir
- Hampir 70% saat ini di lapas sesuai dengan permenkumham adalah narapidana narkoba maka dari itu perlu untuk segera mengesahkan RUU lapas, sehingga bisa meredam overcapacity sampai dengan 50%
- RUU Lapas ini posisinya carry over.
- Menkumham saat ini menolak kedatangan orang asing ke Indonesia kecuali yang mempunyai KITAS atau ada kepentingan negara. Termasuk juga tidak ada transit.

Yasona Laoly

- Agenda sidang kali ini hanya untuk keimigrasian dan lapas saja.
- Paska permenkumham no. 3, 7, 8 dan 11 pada bulan february WNA yang masuk ke Indonesia sudah merosot tajam penurunan dari China.
- Berdasarkan permenkumham 11, memungkinkan WNA untuk ke Indonesia yaitu yang memiliki KITAS & KITAP, Visa Diplomatik dan Visa Dinas, WNA pemegang izin tinggal diplomatic, tenaga bantuan medis, dan alasan-alasan kemanusiaan, WNA yang bekerja pada projek strategis nasional
- Pemasyarakat: lapas dengan overcapacity kami menyadari betul dampaknya. Maka yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan disinventasi, dan pembatasan bertamu kecuali melalui dengan vidcall. Untuk teknis keamanan di dalam lapas juga dijaga ketat yaitu: pada pintu masuk ada spray, dan orang yang masuk akan dispray terlebih dulu; kemudian wajib memakai masker, sarung tangan, mencuci tangan; serta di setiap ruangan disediakan handsanitasi; Selain itu kami juga mengeluarkan warga binaan secara bertahap untuk berjemur.
- Kemenkumham bekerjasama dengan palang merah Indonesia, dalam hal infektanisasi.
- Mengurangi overkapasitas dalam rangka covid: kami dibatasi oleh perUU maka secara bertahap setelah melakukan pengkajian yang intens dengan para jajaran serta pemikiran dari masyarakat, kami mengeluarkan Permenkumham No. 10 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi. Namun ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos tentang PP no. 99/12.
- Adanya permenkumham 10 ini kita bisa mengeluarkan minimal 35.000 dari beberapa excersize. Per hari ini jam 11 siang sudah ada pengeluaran 5556. Dalam seminggu permenkumham dan kepmen ini sudah harus selesai dilaksanakan dan dilaporkan. Ini

adalah pelepasan by law dan kami memastikan tidak akan ada moral hazard. Ini sudah kami laporkan ke presiden. Ini tidak cukup, dan perlu untuk mengubah PP No. 99 yang keta. Maka ada beberapa batasan:

- Narapidana kasus narkoba dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidannya, akan kita berikan asimilasi di rumah (15852 orang)
- Narapidana kasus korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidannya, akan kita berikan asimilasi di rumah (300 orang)
- Narapidana TP Khusus dengan kondisi sakit kronis yang sudah dinyatakan oleh RS pemerintah telah menjalani 2/3 masa pidannya, akan kita berikan asimilasi di rumah (1457 orang)
- Narapida Asing sebanyak 57 orang
- Kemenkumham sudah menyurati MA dan telah menyetujui untuk tidak mengirimkan narapidana in take baru ke lapas. Kapolri juga sudah menahan masuknya yang baru. Jadi yang biasanya perhari kita bertambah 2000 orang.
- RUU Pemasarakatan yang berkaitan dengan RKUHP saat ini DPR sedang membahas tatib yang baru termasuk carry over.
- Carry over yakni ada beberapa pasal-pasal yang akan kita bahas ulang namun dalam pandangan kami, carry over ini karena ada mandate politik dan saat ini ada mandate politik yang baru atau surpres yang baru, akan tetap kita mintakan. Kemenkumham mendapat laporan dari ketua DPR syamsudin yang bicara dengan presiden, kiranya DPR dapat menulis surat ke presiden melalui keputusan komisi III dalam rapat ini, agar segera memproses 2 RUU yang akan datang dengan ketetapan surpres carry over. Saya khawatir jika tidak ada surpres yang baru nanti akan di JR (UU PerUU tentang carry over – maksud yasona) oleh kelompok-kelompok yang nanti bisa menjadi persoalan baru. Kami berhadap kita taati asas legalitasnya dengan baik dan diselesaikan secepatnya.

Wakil DPR

- DPR benar sedang membahas tentang tatib untuk 2 RUU yang carry over ini dan akan disahkan minggu depan dalam rapat paripurna.
- Dalam tatib itu akan menjelaskan surpres yang digunakan adalah surpres dari presiden ketika periode lalu. Karena ini adalah lanjutan pembahasan RUU sehingga otomatis surpresnya akan mengikuti Pembahasan RUU pada masa sebelumnya. Kami sadar RUU ini disahkan akan tidak bisa langsung digunakan dalam rangka penanggulangan covid ini (red RUU Pemasarakatan), namun paling tidak kita mengantisipasi sampai kapan pandemic ini akan berlalu. Kalau memang RUU ini bisa kita bahas bersama, lebih cepat lebih baik.

Herman Hery – ketua komisi

- Secara moral kita wajib membuat terobosan kebijakan yang ditunggu oleh rakyat. Tidak lagi waktunya untuk bermain dengan narasi data, kita bermain dengan narasi politis yang menghibur namun jangan sampai menyalahkan. Maka dari itu saya meminta, adanya langkah dan terobosan konkrit untuk membuat kebijakan.

Yasona Laoly

- Terkait tatib yang diusulkan DPR bisa kita pikirkan dan diskusikan barangkali itu biasa jadi payung hukum
- Saya mengingatkan juga nantinya dalam tatib DPR dimungkinkan pembahasan rencana UU dengan Vidcall seperti ini, manatau ini bisa jadi kendala kita dalam pebahasan RUU yang akan datang.
- Saya juga sepakat kita membuat terobosan yang lebih berani namun tentunya dalam koridor-koridor peraturan yang ada. Dalam kewenangan kami sudah dilakukan, untuk revisi PP kita akan lakukan, dan selanjutnya tentang RUU Pemasaryakatan. Kami juga sudah melakukan refocusing anggaran, dengan membuka ruang-ruang isolasi, yang mana tau ada yang ODP atau PDP. Kami juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan penyiapan RS pengayoman. Tiap kanwil kami punya anggaran tentang itu. Refokusing anggaran ini, memangkas anggaran yang tidak prioritas
- Pelayanan public tetap kami lakukan namun dengan protocol kesehatan yang kami jaga benar

Ahmad Sahroni – Ketua Komisi III

- Saya mau tanya pak menteri, masalah SULTRA 49 PKA kenapa yang jawab kok Menkomaritim kalau sopnya sesuai aturan
- Kedua, bagaimana menyikapi yang di lapas deng wabah yang ada apakah para tahanan tersebut sudah melewati rapid test, ataukah bila ada yang corona di sana bagaimana pak menteri menyikapinya?
- Saya setuju untuk tidak melihat warna dulu (partai) namun kemanusiaan. Namun bilamana tidak ada gerakan yang signifikan dengan intervensi pemerintah yang luar biasa, saya yakin wabah ini bisa terbesar di Indonesia di antara yang lain. Jadi lapas dari sabang sampai merauke tolong dijaga benar berdasarkan kewenangann pak menteri.

Yasona Laoly

- Masalah Sultra memang sudah sesuai permenkumham, namun kenapa pak menkomaritim yang menjawab itu merupakan hasil rapat di menkomaritim fest yang juga dihadiri menteri tenaga kerja, menlu, dan beberapa menteri. Karena ini menyangkut isu tidak hanya domain kemenkumham, ini juga menyangkut investasi. Jadi pada waktu itu kami memberikan informasi dan pak menko yang menjelaskan. Itupun jajaran kami dari kanwil dirjen imigrasi sudah menjelaskan kepada public bahkan menyampaikan secara rinci melalui rilis pers. Saya tidak menjelaskan karena begitu kesepakatan. Kanwiil sultra juga sudah menjelaskan ini.
- Kami di seluruh kanwil sudah melakukan seluruh proses protocol kesehatan untuk penanggulangan covid 19, sesuai dengan standar dari menteri kesehatan. Mohon maaf untuk rapid test, tidak ada, bahkan untuk kita sebagai negara sendiri sangat terbatas. Rapid test akurasi hanya 70% - 80% dan disamping harganya yang mahal dan tidak ada stoknya. Pemerintah melakukan upaya untuk memperbanyak rapid test, setidaknya-tidaknya dengan pemeriksaan suhu badan, atau jika ada batuk atau demam langsung dilaporkan ke jajaran kita. Jika ada indikasi kita msukan ODP. SOP kesehatan benar-benar kita lakukan. Kami juga memproduksi disinfektan (Lapas Malang) dan kami jual keluar dan beberapa menjual masker buatan sendiri.

Aziz Syamsudin

- Tatib dan RUU pembentukan UU yang rencananya akan dibawa ke dalam rapat konsultasi pengganti Bamus siang ini untuk dibawa ke paripurna paling lama hari Kamis atau Selasa depan. Dalam forum rapat virtual ini adanya kesepakatan antara Komisi III dan Kemenkumham untuk RUU agar dibahas tidak terlalu lama. Adanya perdebatan perlu atau tidaknya suatu surpres kami sudah melakukan koordinasi, bahwa hal itu bisa dilakukan tanpa surpres, karena dalam tatib yang dibahas sudah memungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan.

Yasona Laoly

- Penting tatib itu Pak Ketua, jadi ada payung hukum, saat ini kita belum ada Pak Ketua, karena terjadi perdebatan di situ. Ini bisa menolong kita Pak Ketua. Jika itu sudah disahkan, tolong disampaikan ke Bapak Presiden agar prosedurnya benar.

Aziz Syamsudin

- Prosedurnya dengan mekanisme Pak, melalui Komisi 3 – pimpinan Komisi 3 untuk melakukan diskusi dengan pemerintah dalam hal ini Menkumham untuk selanjutnya hasil keputusan dan kesepakatan dari Menkumham dan pimpinan Komisi 3 untuk dibawa dan dikirim dalam surat untuk kita rapat di dalam Bamus dan fraksi-fraksi di dalam DPR.

Arsul Sani - PPP

- Jika pembahasan kali ini hanya ingin berfokus seperti yang tadi Pak Menteri jelaskan terkait dengan Permenkumham No. 10/2010 & Kepmenkumham No. 19/2020. Kalau saya membaca Kepmenkumham 19/20 maka terkait dengan pengeluaran dan pembebasan napi termasuk anak yang ada di dalam lapas itu parameternya hanya didasarkan pada masa tahanan yaitu telah dijalannya masa hukuman 2/3 tapi belum ada parameter yang berbasiskan pada kelompok rentan seperti narapidana yang sakit, lansia, ibu hamil/menyusui, nah kami berharap ini bisa jadi parameter dalam pembebasan dan pengeluaran warga binaan pemsyarakatan.
- Disebutkan berbasis pada permenkumham dan kepmenkumham maka akan ada sekitar 30.000 an narapidana warga binaan pemsyarakatan yang akan dikeluarkan dan itu mencapai sekitar 15% dari narapidana yang ada. Saya membayangkan jika ada asimilasi pembebasan bersyarat maka akan ada fungsi pengawasan dan pembinaan dari jajaran/dirjen pemsyarakat (Patas & Pembimbing Kemasyarakatan). Petanyaan saya, apakah hal ini juga sudah diantisipasi kapasitas teman-teman Bapas untuk melaksanakan tupoksi-tupoksi yang menjadi pekerjaan Bapas dan PK?
- Saya berpandangan dari bersusah-susah untuk merevisi PP 99 yang nanti beban politiknya nanti ditanggung sendiri oleh pemerintah akan lebih baik kita menyelesaikan RUU Pemsyarakatan sehingga kalau ada kritik yang kontra dari public, maka ini merupakan kerja bareng dari Pemerintah dan DPR sehingga responnya pun bisa dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan DPR.

Yasona Laoly

- Benar bahwa parameter yang kami pakai belum ada untuk lansia, disabilitas dll, nah ini akan direvisi PP nanti pak, *revisi kedua*. Ini akan saya bawa ke Ratas supaya ini bisa cepat, Presiden secara prinsip sudah setuju pak. Selain tindakan-tindakan protokol kesehatan yang kita lakukan di lapas, tentu mengurangi over kapasitas adalah suatu strategi yang sangat penting dan wajib kita lakukan.
- Kami juga sudah menghitung dan mengantisipasi Bapas, tentu, sumber daya kita akan kita gunakan di sana ataupun jika petugas Bapasnya kurang nanti akan kami tambah sesuai kebutuhan yang berlaku. Jadi ini sudah kami antisipasi.
- Kalau ini keluar 30.000 yang kami antisipasi sebagai negara adalah akan meningkatkan penduduk Indonesia secara tiba-tiba. Suami istri sudah lama tidak ketemu, ini memang akan menjadi blessing tersendiri. Tetapi akan ada tambahan penduduk 9 bulan kemudian. Ya itu baik-baik saja.

Sarifuddin Sud

ing – PAN

- Penjelasan Menlu dalam keputusan Ratas telah dihentikan kunjungan dan transit Asing masuk ke wilayah Indonesia. Kecuali KITAB/KITAS, Izin tinggal diplomatic, izin dinas *DLL*. Frasa *DLL* ini berarti masih terbuka ruang sebenarnya untuk WNA masuk ke wilayah Indonesia, dan peraturan ini akan dibuatkan Permenkumham sebagai landasan hukumnya. Pertanyaan saya, bagaimana memaknai pengecualian dan frasa itu dalam kaitannya dengan pencegahan Covid-19?
- Data menkumham tentang penolakan dan pencegahan orang asing dari 1 Feb – 25 Maret totalnya ada 239 WNA yang ditolak masuk di imigrasi, saya mau tau alasannya apa? Karena di beberapa kali kesempatan justru presiden dan luhut bahwa kita akan menggenjot terus pariwisata dan investasi dsb apa ini tidak bertolak belakang dari program Pak Jokowi?
- Bagaimana dengan kedatangan TKA tanggal 15 maret di Kendari yang berjumlah 39 orang. Pak menteri tadi sudah mengatakan ini sudah sesuai permenkumham, bukan itu masalahnya Visa yang mereka gunakan itu Visa kunjungan dan bukan Visa Kerja. Ini sudah disampaikan oleh kakak ulil (?) yang di Kendari dan juga disampaikan juga oleh pihak ketenagakerjaan. Jadi bagaimana sebenarnya peranan imigrasi yang masih memberikan ruang dalam hal menyangkut pengawasan WNA. Soal penyalahgunaan visa ini oleh WNA ini masih terjadi di mana-mana.
- Selain itu beberapa kepada daerah termasuk Gubernur DKI meminta data terkait dengan kedatangan WNA, ternyata data yang diminta ini oleh para kepala daerah ini sama sekali tidak disampaikan, apakah datanya tidak ada atau tidak ada koordinasi menyangkut masalah Covid-19 ini. Pak Menteri selalu mengatakan bahwa sistem kita sudah bagus namun ketika kepala daerah meminta data dalam rangka untuk pencegahan penyebaran kok tidak diberikan *gitu loh*. Jangan hanya menyampaikan sistemnya bagus tapi implementasinya tidak ada, nol!

Yasona Laoly

- Permenkumham 11/20 pengecualiannya tidak ada yang lain-lain. Pengecualiannya untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing pemegang izin tinggal diplomatic dan izin tinggal dinas, bantuan dukungan medis, pangan dan alasan kesehatan, alat angkut (pesawat yang membawa logistic), orang asing yang bekerja pada proyek strategis nasional. Tidak ada yang lain-lain.
- Beberapa WNA yang masuk ditolak itu karena alasan kesehatan. Kemenkumham sesuai dengan protap di TPI baik pelabuhan laut dan darat, prosedurnya diperiksa dulu oleh KKP termasuk surat alur kesehatannya, yaitu KKP karena alasan kesehatan sudah boleh masuk, baru ke *kita* . Protap ini sudah dilakukan TPI semua pelabuhan laut dan darat di *kita* . Pada Permenkumham yang lalu, WNA yang masuk dalam permenkumham 8 yang lalu bukan hanya dari WN Tiongkok bisa saja WN negara lain pekerja yang bekerja di oil & gas, petrochemical. Kita tau juga protocol kesehatan di Tiongkok betul-betul sangat ketat karena kedubes kita di Beijing itu sangat ketat.
- Mengenai data, kami tidak pernah menyembunyikan data-data, kalau lembaga resmi yang meminta, atau aparat hukum, kita akan berikan sesuai dengan peraturan perUU yang berlaku.
- Semua ini kita lakukan bertahap dari Permenkes 3, 7, 8, dan sekarang 11. Tahapan yang terakhir ini kita harapkan yang maksimal. Biasanya kita bilang 3 bulan namun sekarang kita tetapkan menunggu kondisi Covid-19 tidak ada lagi, maka baru kita ubah lagi terkait masuknya WNA ke Indonesia kembali.

M. Nasir Djamil – PKS

- Situasi seperti ini pemerintah harus berani mengambil sikap untuk tidak menerima siapapun meskipun tadi menkumham sudah mengatur tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia dengan syarat-syarat itu. Namun dengan kondisi seperti ini Indonesia tidak mengambil resiko. Walaupun ada protocol yang super ketat yang disampaikan tadi. Kemarin di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, ada 7 WNA yang juga merupakan TKA dari Tiongkok. Ketika sampai, WNI di sana menolak mereka untuk masuk ke tempat kerja mereka di Nagarya dan sekarang mereka dipulangkan kembali jam 10. Kemenkumham dan Imigrasi Aceh bertindak cepat untuk memulangkan mereka.
- Selanjutnya ini tentang Permenkumham 10/20 menyangkut pemberian untuk dikeluarkan sekitar 35.000, namun sepertinya rujukannya ini adalah masa tahanan, sehingga orang berpikir bahwa yang akan dibebaskan itu memang adalah orang-orang yang memang sudah selayaknya atau memang sudah akan diberikan hak-hak mereka. Apa yang dikatakan Bang Arsul tadi seharusnya menjadi rujukan dalam menerbitkan permenkumham tsb. Jadi bukan hanya masa tahanan tapi juga orang rentan, terpapar dengan virus Corona harus menjadi rujukan.
- Selain itu juga permenkumham ini diskriminatif, kenapa napi kasus tipikor (pidana di atas 10 tahun, red) tidak dimasukan, apakah pak menteri yakin mereka belum terpapar Corona? Oleh karena itu napi apapun itu bisa terpapar virus Corona. Maka dari itu kami melihat seharusnya permenkumham ini juga menysasar napi tipikor, bukan malah menghambat. Apalagi PP 99/12 itu produk politik ketimbang produk hukumnya.

- Terakhir bagaimana proses implementasi permenkumham 10/20 ini clean&clear. Mungkin pak menteri bisa melakukan berbagai upaya untuk mencegah moral hazard seperti yang disampaikan tadi dan terealisasi di lapangan, sehingga ke depan kita tidak dengar ada ini ada itu, atau orang-orang yang mengambil kesempatan dalam keadaan seperti ini.

Yasona Laoly

- Permenkumham No. 11 tidak ada TKA dibuka ruang hanya kepada WNA yang punya visa diplomatic, KITAS/KITAP dan mereka yang bekerja di proyek strategis nasional termasuk orang asing yang masuk bawa pangan, medis dan bantuan kemanusiaan dll. Diplomat yang masuk mungkin ada persoalan, tapi akan ada prosedur kesehatan yang ketat dan bersedia di karantina. Jadi tidak ada itu yang dikatakan Pak Nasir.
- Orang-orang di lapas saat ini dicek dulu kesehatannya, suhu tubuhnya. Kalau ada kecurigaan dia langsung tidak dilepas, langsung ODP di rumah sakit pengayoman di ruang-ruang isolasi di setiap rutan Kanwil saat ini. Sekarang malah ada rujukan RS Pemda bahkan ada di beberapa kabupaten tertentu
- Mengenai Permenkumham itu diskriminatif, memang tidak bisa menabrak PP pak, maka kami sedang membuat exercise sekarang untuk merubah PP untuk napi tipikor, napi teroris, napi arap (?) narkoba. Memang tidak bisa kami lakukan, jadi hanya yang di bawah 10 tahun yang tidak terikat PP. Semoga dalam waktu dekat ini dapat kami selesaikan (revisi PP?), terima kasih

Mulyadi - Partai Demokrat

- Tadinya saya mau bertanya tentang kebijakan hukum dan operasional yang diterapkan oleh Kemenkumham tapi tadi sudah diterangkan panjang lebar walaupun masih ada keinginan dari rekan-rekan untuk mengambil kebijakan yang lebih berani lagi namun tetap dalam koridor perUU.
- (Bertanya pada Kanwil Sumbar), berapa banyak warga binaan yang dibebaskan yang ada di Sumatera Barat.
- Rapid test itu menurut hemat saya tidak terlalu mahal pak menteri, sekitar 50 ribu dengan ongkos kirim 55 ribu. Jika target warga binaan yang 50 ribu itu dikalikan dengan 3.2 US dollar itu hanya sekitar 2.5 milyar (rupiah), sehingga pada saat mereka dilepas ke masyarakat sudah diskriminasi. Kecuali yang positif, melalui rapid test dengan swab test. Karena dengan swab test itu kan biayanya sangat mahal 1.3 juta dan kemampuan lab sangat terbatas dan tidak bisa dilakukan dalam jumlah besar. Barangnya tidak susah juga pak, bisa dipesan kalau hanya untuk 50 ribu orang yang akan dibebaskan, kemenkumham bisa lah menganggarkan. Jadi masyarakat yakin napi yang dilepas itu tidak membawa virus corona.
- Kebijakan pemerintah yang melarang WNA, ada pengecualian untuk orang asing yang sedang menggarap proyek nasional. Ini harus didefinisikan pak menteri, ini bisa jadi peluang untuk pihak-pihak tertentu yang mengatakan proyek mereka itu proyek strategis nasional. Masuknya WNA dengan pengecualian ke daerah harus memanfaatkan sekali online sistem ini, jadi ada pengawasan dan kita juga tau jumlahnya berapa dan terpadat, tentunya sistem online yang mudah diakses ya pak.
- Pertanyaan public juga ini, adanya skenario darurat sipil, apa itu yang dimaksud darurat sipil saya rasa bisa pak menteri sampaikan agar pemahamannya sama dengan rencana

skrenario darurat sipil. Ataupun terkait dengan pembatasan skala besar melalui PP dan Kepres yang sudah diTTD presiden, sehingga kami juga bisa mengedukasi ke masyarakat tentang kebijakan ini.

Yasona Laoly

- Soal rapid test, kemenkumham bahkan sudah menganggarkan 10 miliar tapi barangnya ini sulit sekali dan diprioritaskan hanya ke tenakes, orang-orang PDP, ODP. Sehingga masih sekarang ini masih sangat sulit. Kita mau barangnya ini yang betul-betul dan ga mau berurusan dengan apa? Jadi barangnya ini yang betul-betul yang disetujui menkes. APD sudah kita anggarkan 1.3, masker 340 ribu, ambulans khusus 3 M, ini tetap bisa kita gunakan walau sudah tidak ada lagi Covid-19.
- Proyek strategis yang dimaksud itu sudah ditentukan oleh bappenas, kita ga bisa tambah-tambah lagi. Saya memang belum dapat informasi itu tapi itu ada ketentuannya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Berikutnya tidak ada itu darurat sipil, adanya adalah pembatasan sesuai dengan UU No. 6/2018 yang dikenal dalam konteks penyebaran penyakit menular adalah karantina rumah, wilayah, kesehatan, dan juga ada yang kita sebut pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar jika jika kasus penyebarannya sudah signifikan daerah bisa meminta pembatasan ini, dan dari usul BNPB, menteri kesehatan dapat menentukan status suatu daerah tertentu. Namun pembatasan ini tidak sama dengan karantina total. Untuk kebutuhan penduduk, kebutuhan kerja, kebutuhan lalu lintas kerja ini masih tetap dimungkinkan. Ini sudah ada berita negaranya jadi dapat diunggah oleh semua.
- Ketentuan berikutnya pembatasan skala besar diusulkan oleh bupati/walikota, gubernur kepada menteri yang menjalankan pemerintahan dengan mempertimbangkan kondisi pandemic di daerah itu, dengan tentunya mempertimbangkan aktivitas pendidikan, produktivitas kerja dan kelangsungan ibadah penduduk. Ini ada di Perpres 56/2018 sehingga tidak bisa lagi ditafsirkan lain.

Jujun – PKB

- Terkait dengan imigran yang kembali dari berbagai negara ini kan problem juga, saya khawatir dengan anggota bapak semua seluruh Indonesia sedangkan mereka belum siap dengan APD. Berita hari kemarin sampai hari ini dari zohor di Batam, pasukan bapak gimana di sana, gimana persiapan bapak?
- Terkait PKA, saya tidak bicara yang kendari. Kita satu narasi jangan bikin rakyat marah. Lalu kita DPR ini, ke mana arahnya, ini tiba-tiba penjelasan bahwa itu legal, beda-beda narasinya, imigrasi beda, polisi beda, kemenaker narasinya beda juga, saya minta ga kejadian begitu lagi. Ada satu lagi TKA bintang masuk lewat laut, mereka masuk lewat laut. Padahal Menko bilang tidak ada lagi TKA masuk berdasarkan rilis kemarin. Ini memang data sekunder dari media
- Terkait agama, apa scenario jika ibadah haji diizinkan tahun ini dari imigrasi sehubungan dengan pembuatan paspor yang merupakan siklus tahunan. Biasanya di bulan Ramadhan ini harus diantisipasi untuk Jemaah haji.
- Di internal lapas, skema-skema tadi saya sudah lihat anggarannya, menurut saya yang paling penting juga untuk para petugas APDnya. Perangkat petugas harus dipastikan tidak

terinfeksi. Kalau sampai sekarang paparan bapak belum dilakukan tes kan? Jangan jangan sudah banyak berderetan yang tertular, karena tadi bapak kelihatannya kesulitan juga skema 207ribu baru sampe 30 rb.

Taufik Basari – Nasdem

- Saya mencatat adanya kebijakan-kebijakan itu masih diskriminatif karena tidak memperlakukan narapidana itu secara sama, seharusnya apapun latar belakangnya diperlakukan sama. Saya paham kesulitan dari kemenkumham karena tersandra PP 99. Maka saya usul rekomendasi dalam raker komisi III ini adalah pencabutan PP 99 dalam waktu seminggu. Karena ini adalah masalahnya untuk menyelamatkan nyawa di dalam lapas. Harapannya setelah ini dicabut, ada juga revisi permenkumham, kepmenkumham dan lainnya. Dalam setiap kunjungan kerja saya ke lapas, permintaan dari napi narkotika terutama, mereka meminta bahwa sebaiknya ini dicabut.
- Berdasarkan Permenkumham 10/20 saya harap ada rapat tertulis dari kemenkumham kepada komisi III mengenai nama-namanya ataupun klasifikasi orang yang akan masuk atau sudah masuk dalam program ini. Ini termasuk fungsi pengawasan kami, agar tidak ada kongkalikong dalam hal kita menjalankan program ini, selain itu juga jangan sampai ada orang-orang sebenarnya berhak menjadi terlewat karena ada suatu hal administrasi.
- Terkait asimilasi dalam permenkumham 10/20 saya juga usul adanya remisi umum sehubungan dengan covid-19 ini, yang beelaku untuk semuanya. Indikatornya bisa kita lakukan dari usia, masa pidana, disabilitas dll.
- Terkait imigrasi selain data WNA, data WNI yang berasal dari redzone juga penting dan dibuat kategorisasinya, ini berguna untuk tracking apabila ada WNI yang masuk dari awal maret ini. Data ini jangan sampai kita tidak punya dan jika punya jangan sampai kita tidak berkoordinasi dengan orang yang berkepentingan di daerah.
- Layanan perpanjangan visa untuk WNA, mohon untuk diperhatikan untuk tetap menetapkan protocol pencegahan Covid. Di Denpasar Bali, ada WNA yang mengantri tidak mengikuti protocol pencegahan Covid.

Yasona Laoly

- Tentang buruh migran memang kita lihat influk yang besar terutama dari Batam, termasuk Sumatera Utara. Pemerintah tidak hanya kemenkumham, Kapolri, TNI, Kemenkes sudah Ratas kemarin khusus untuk masalah itu. Kita sudah menyiapkan sembako untuk WNI yang tidak bisa kembali dari Malaysia. bekerja sama dengan TNI. Petugas kita sudah kami siagakan dan memenuhi protocol Covid-19 termasuk KKP. KKP akan mendeploy orang-orang, ke batam dan pusat-pusat TKI kita, perbatasan kita: Sarawak, batam, tanjng balai karimum, ini semua kita siapkan. Jika memang ada yang diduga ada kecenderungan Covid 19, (????).
- Tentang karantina orang (TKI) yang kembali ke Desa ini sudah kita antisipasi, untuk TKI kita yang kembali dari Malaysia dan ini juga sudah kita siapkan.
- TKA untuk satu bahasa untuk permenkumham. Bahwa dalam UU imigrasi dimungkinkan orang 211A beralih menjadi TKA dengan rekomendasi dari kemenaker itu dimungkinkan secara perUU. Itu sebabnya masalah ini dibahas sampai tingkat menko. Makanya mereka disiolasi di bawah pengawasan RS bhayangkara, mereka sama sekali tidak terpapar. Untuk

nanti bagaimana statusnya kemenkumham dan kemenaker akan mengevaluasi mereka, jika mereka ingin melanjutkan proses.

- Soal haji, jika soal passport sudah selesai sebelumnya, karena ini sudah terencana jadi sudah selesai 80%. Namun kami dapat informasi dari pemerintah arab Saudi, ada berita untuk menunda dulu persiapan untuk naik haji. Karena belum bisa memutuskan untuk melanjutkan ibadah haji di tahun ini. Sementara belum ada perkembangan. Namun jika itu terjadi, tentu kami akan menyiapkan bantuan dari TNI dan polri. Prinsip Social distancing akan dilakukan dan jika ada kebijakan baru dari pemerintah arab Saudi, pemerintah Indonesia akan membuat persiapan-persiapan secara khusus untuk itu.
- Soal PP 99 memang harus ada revisi PP, yaitu PP 32 dan 99. Ini kami lakukan secara bertahap. Revisi 99 sudah kami lakukan 3 tahun lalu ke Sekneg, memang masih belum dibahas tindak lanjutnya, namun kami sudah membahas ini lagi ke mensekneg. Untuk bagaimana hasilnya revisi PP, kalau memang tidak tuntas paling tidak sebagian dari itu akan kami lakukan, dan sampaikan secara bertahap.
- Data WNA dari region ada di KKP ada penelusuran dari *Health Card Alert (?)* jadi KKP bekerjasama dengan imigrasi. Setiap WNA yang masuk ada kartunya ada entrinya ada sistemnya dari kemenkes. Memuat di mana mereka tinggal, riwayat perjalanannya, dalam *Health Alert Card*.
- Untuk yang di Bali itu di waktu yang lalu, sekarang kita sudah menetapkan perpanjangan visa otomatis bagi negara-negara yang lockdown untuk mencegah bergerombol.
- (Terkait yang masuk WNA lewat Bintan belum dijawab pak menteri). Jawab: Jadi Permenkes 11 berlaku 00.00. jadi yang terjadi kemarin itu masih terjadi karena sesuai dengan permenkes 8.

Muhammad Syafi’I – Gerindra

- Pembahasan UU bisa dilakukan secara virtual itu berkali-kali mengatakan. Saya menginformasikan ini tinggal paripurna saja. Karena seluruh fraksi sudah merevisi pasal 114, bahwa “Presiden dan DPR dapat mengajukan rancangan baru di luar prolegnas”; Pasal 254 “bahwa rapat seluruhnya bisa dilakukan secara virtual”; pasal 279 bahwa “daftar hadir dilakukan secara virtual; pasal 308 “keputusan bisa dilakukan secara virtual”. Jadi tidak ada masalah tentang RUU Carry over, itu bisa terus dilakukan meskipun wabah ini belum selesai.
- Saya terusik dengan keputusan kemenkumham dengan pembebasan para napi. Ini dilakukan di seluruh dunia dilakukan diskresi karena persoalan wabah. Bukan hanya PP yang dilanggar karena wabah ini, solat jumat juga boleh tidak dilakukan. Tadi juga pak menteri juga mengulang ada kemungkinan hajinya itu juga bisa ditunda. Karena ini bukan soal persoalan hukum saja, ini persoalan nyawa. Pembebasan para napi itu diskriminasi karena alasan PP itu saya rasa kurang tepat. Pembebasan itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sehingga opsi-opsi yang rentar, lansia itu lebih dominan daripada masa tahanan.
- Tentang kepada daerah, mereka sebagai gugus tugas penangkalan covid 19. Banyak kepala daerah yang membuat kebijakan yang berbeda dari pemerintah pusat. Ada kepada daerah yang melock down daerahnya padahal itu kewenangan pemerintah pusat. WNA yang masuk ke daerah-daerah juga WNI dari luar negeri yang masuk ke daerah-daerah bagaimana bentuk kerjasama kumham dengan kepala daerah, apakah itu tentang data dan

informasi, action, serta sejauh mana refocusing keamanan kumham dari garda terdepan yang menerima masuknya WNA/WNI dari luar negeri.

- Pimpora, --- banyak TKA yang selalu dibela sama menteri luhut, saya ga ngerti kepentingannya dibela saja dengan menteri luhut ini. Mereka bekerja di Indonesia tapi tidak dengan izin sebagai TK. Mumpung dengan keputusan pak menteri yang patut diapresiasi, untuk kemungkinan TKA masuk yang baru dan akan di lock jam 00.00. mumpung tidak ada yang masuk yang baru saya kira timpora bisa bekerja maksimal untuk memeriksa dokumen TKA yang sedang bekerja di negeri kita. Kalau memang doknya belum sebagai pekerja, ini saatnya kita mendeportasi besar-besaran TKA yang tidak memiliki izin kerja. Pak menteri jangan takutlah dengan luhut, karena ini memang kewenangan dari pak menteri bukan dari menkomaritim dan investasi.

Andi Rio Idris Padjalangi - Golkar

- Persoalan covid 19 ini betul-betul menjadi perhatian serius, oleh karena dari fraksi nasdem meminta untuk kesimpulan rapat untuk mencabut PP 99, tapi pak menteri bilang saat ini sudah direvisi, atau diajukan revisi ke sekneg. Maka salah satu caranya untuk menanggulangi covid 19, bisa untuk direkomendasi rapat kali ini, untuk mencabut PP 99 tersebut atau RUU Pemasarakatan ini lebih cepat disahkan.

Masinton Pasaribu - Fraksi PDIP

- Polemik tentang di kendari kami minta datanya saja nanti pak menteri, kami minta data visa 211A, karena kami punya Salinan data dari kemenaker bahwa datanya itu menggunakan visa kunjungan B211 oleh menko luar biasa penuh menyampaikan bahwa itu menggunakan visa 211A. Agar ini tidak menjadi polemic buat kita, kami ingin kroscek ke imigrasi tentang visa kunjungan itu.
- TKA asal RRC di bintang kemarin, ketika presiden dalam ratas untuk melakukan pembatasan namun buktinya bisa masuk, saya minta prosedur dan datanya, agar ini tidak menjadi tanya jawab. Imigrasi harus menyiapkan itu. Kami juga tau tentang investigasi, bapak mungkin mengiras kami tidak tau, kami sudah banyak tau tentang itu.
- Karena ini menyangkut situasi darurat, kita minta supaya jajaran pemerintahan bertindak dalam situasi yang memahami disaster management, karena ini bukan dalam suatu hal biasa/normal. Dari saya melihat penganggaran khusus untuk covid ini dari persiapan diri. Kemenkumham melakukan mitigasi di institusinya thd kebutuhan personel petugas terutama di lapas, apakah sudah dilakukan pengecekan setiap hari? Apakah sudah dipastikan setiap hari, itu tidak terlihat dari postur anggaran yang dipaparkan tadi.
- Rekap anggaran 33.5 m yang mengkover 524 lapas saja itu tidak cukup. Di dirjen pemsarakatan 20.33 M kalau kita bagi 524 lapas, jika dirata-rata hanya 50 juta apa itu cukup? Ini justru anggaran yang menurut saya jauh dari cukup. Sementara PNBPN ada di kemenkumham ada 2 triliun kenapa ini tidak digunakan untuk mitigasi pelayanan public: lapas dan imigrasi. Ini harus keluar cara berpikir situasi normal, ini situasi tidak normal. Penganggaran harus juga memitigasi dan risk management.

Yasona Laoly

- Saya kira belum ada covid di lapas, tapi ada data yang positif 3, PDP 5, ODP 12, seluruh kementerian (kumham), 1 sembuh, 1 meninggal di kantor sentra mulia yang punya riwayat sakit asma berat. Itu yang kami tau, kecuali pak masinton lebih tau dari kami. Setiap petugas yang batuk tidak diperbolehkan masuk kerja, kami punya standarnya. Prosedur protap kami jalani betul karena kami menyadari betul over kapasitas itu sangatlah mengerikan maka protapnya melebihi dari protap di kementerian sendiri. di kantor kemenkumham sudah melakukan WFH. Memang ada petugas kita di bandara soeta yang 5 orang terkena tapi sudah sehat 3. Jadi protap kesehatan ini sama dengan KKP protocol yang kami ikuti di TPI-TPI. Kami tidak akan membahayakan orang-orang kami, tidak mungkin itu.
- Soal anggaran itu 33 M itu dari sini (kumham), dan setiap kanwil membuat refocusing anggaran juga, BNPB juga sudah melakukan refocusing anggaran dan revisi anggaran. Arahan pak presiden sudah jelas, anggaran-anggaran rutin yang tidak prioritas kita alihkan semua ke penanganan yang ada. Jika dibutuhkan data-data yang masuk, akan kami serahkan kepada komisi III. Namun kita tidak perlu menyampaikannya kepada public belakangan masuknya permen2 cukup dirjen yang menyampaikan. Karena prioritas kita beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita perlukan sekali dalam pencegahan ini.
- Tidak cukup memang dengan permenkumham 11 masih dengan revisi PP ini kita buat kajian-kajiannya semua. Betul bahwa keselamatan warga binaan kita perhatikan namun kita terhalang PP, tidak mungkin permen menabrak PP. Maka, yang lansia 60 tahun, yang memiliki penyakit secara terus menerus, disabilitas, akan kami prioritaskan dan bawa ke ratas kembali, mungkin lusa. Lalu kemudian PPnya akan kita selesaikan minggu depan. Tebtu dengan prinsip kehati-hatian.
- Saya sudah menjawab soal diskriminasi, tapi tidak mungkin dengan permen.
- Refocusing anggaran kami sudah lakukan dan sedang dalam proses menteri keuangan dan yang bisa tanpa persetujuan menkeu sudah kami lakukan
- WNA yang masuk dengan alert card, sudah ada di KKP sudah ada sistem untuk itu, masalah kesehatan bukan urusan kami, namun WNA visanya urusan kemenkumham maka pemantauan orang asing dengan alert card adalah kewenangan menkes melalui KKP. Alert card sudah ada sejak covid masuk.
- Timpora bekerja sama dengan kemenkumham untuk memeriksa orang-orang asing. Sepanjang mereka sesuai dengan ketentuan perUU kita tidak mungkin deportasi. Sama dengan yang di kendari, masi memenuhi ketentuan permenkumham no. 8, ini bukan bersilat lidah, mereka masuk dikarantina, masuk dikarantina lagi. Kemudian, menurut UU Keimigrasian kalau kemenaker dan sponsornya bisa mengalihstatuskan (?), UU memperbolehkan itu. Rapat di menkomaritim, kalau memang bisa dimungkinkan dan orangnya sehat, dan harus ada dari kemenaker. Itu dari rapat menko, bukan saya putuskan sendiri, sudah berkali-kali dijelaskan. Dari kalwil sultra, dirjen imigrasi dan humasnya sudah menjelaskan berkali-kali. Untuk bintang akan kami berikan datanya, mereka masuk dengan permen no. 8

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir

- Maaf pak menteri ini sudah pukul 14 jadi masih ada hal-hal yang harus disampaikan rapat kita perpanjang 20 menit.

Yasona laoly

- Kami akan terus membahas pembahasan RUU Pemasarakatan maupun RKUHP, kita sudah sepakat mengenai hal itu. Kalau memang DPR sudah membuat tatip paling tidak itu sudah ada landasan hukum. Tapi dalam kondisi sekarang itu belum bisa dimungkinkan sebelum ada rujukan ketentuan yang lebih jelas mengenai hal ini.
- PP Pembatasan sosial berskala besar, kepada daerah dapat menyampaikan usulnya kepada BNPB dengan kajian yang baik. Pemerintah mendengar usul-usul yang baik, namun pemerintah belum berpikir unruk lock down karena, contohnya di italia dan india itu gagal total, terjadi influx. Lock down tanpa memperhatikan secara baik kebutuhan masyarakat karena masih banyak yang hidup dengan penghasilan perhari. Kami sudah menghitung refocusing anggaran dengan social safety net, diperkirakan sampai ratusan triliun dan dengan prinsip kehati-hatian. Hongkong, Taiwan, Jepang berhasil tanpa lock down ini merupakan kajian-kajian kita dalam menetapkan kebijakan.
- Di lapas dan imigrasi prisnsip begini yang kita lakukan, berdoa kepada tuhan untuk kita tidak kena musibah. Tidak ada yang fatal, justru yang meninggal itu di kantor kementerian. Petugas imigrasi sudah sehat 3 orang. Jadi tuduhan pak masinton yang mengatakan kami tidak memperhatikan orang-orang kami itu sangat tidak berdasar.

Kesimpulan:

1. Komisi III meminta menkumham untuk tetap memperketat fungsi keimigrasian pengawasan dan pemantauan TKA atau TKA untuk mencegah penyebaran covid 19
2. Komisi II meminta menkumham untuk menerapkan protocol kesehatan / physical distancing dalam situasi darurat kesehatan ini di setiap LP/rutan termasuk di dalamnya upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan, khususnya terhadap kelompok rentan atau rawan terjangkit covid 19. Demikian oula untuk terus menjadikan pemantauan terhadap kesehatan seluruh narapidana/ tahanan dan petugas pemsarakatan dan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terkait dengan potensi penyebaran covid 19
3. Komisi III meminta kemenkumham untuk segera mempersiapkan RUU pemsarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu dalam memperbaiki sisitem peradilan pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni LP/Rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit.